

ISBN 978-602-60771-0-3



PROSIDING



*“Penguatan Peran Aparatur Sipil Negara sebagai ujung Tombak
Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Tingkat Lokal”*

Bandar Lampung, 14 November 2016

**DITERBITKAN OLEH
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**



**Prosiding Seminar Nasional
Grand Design Reformasi Aparatur Sipil Negara**

316 halaman, 28 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

copyright @ 2016

ISBN: 9786026077103

Penyunting:

Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A.

Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

Diterbitkan oleh:

Jurusan Administrasi Negara FISIP

Universitas Lampung

Alamat Penerbit:

Gedung B Lantai 1 FISIP Unila Jl. Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung,
35145, Indonesia. Telp. (0721) 708881.

DAFTAR ISI

Makalah Kunci

Reformasi Aparatur Sipil Negara: Harapan, Mitos, dan Fakta: Sebuah Kritik Kebijakan
Oleh: *Dr. Riant Nugroho* 1-39

Shared Values sebagai kunci pendorong perubahan dan revolusi mental Aparatur Sipil Negara
Oleh: *Dr. Adi Suryanto* 40-45

Makalah Terbaik

Model Kebijakan untuk Meningkatkan Laporan Kematian dalam Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat
Oleh: *Dr. Achdiat, M.Si. dan Dr. Yaya Mulyana, M.Si.*..... 46-59

Makalah Utama

Implementasi Lelang Jabatan dalam Rangka Membangun Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara
Oleh: *Ari Gusnita, S.A.N., M.Si.* 60-71

Dual System Penilaian Kinerja untuk Mewujudkan Profesionalitas Aparatur Sipil di Daerah
Oleh: *Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.* 72-94

Reformasi Aparatur Sipil Negara Menghadapi Tantangan (Perlawanan Pejabat Kepala Daerah terhadap Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara)
Oleh: *Drs. Moh. Waspa Kusuma Budi, M.Si. dan Herman Sismono, S.Sos., M.A.P.* 95-105

Media Sosial, Pejabat Publik dan *Good Governance*
Oleh: *Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.* 106-125

Analisis Komponen Indeks Modal Sosial Masyarakat di Provinsi Lampung
Oleh: *Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. dan Endry Fatimaningsih, S.Sos., M.A* 126-138

Pengukuran Kualitas Pelayanan Sektor Publik Dalam Rangka Peningkatan Budaya Pelayanan Prima (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung dan Metro)
Oleh: *Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc. dan Agung Wibawa, S.Sos., M.Si* 139-156

Model Penilaian Kinerja Silang untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
Oleh: *Drs. Slamet Muchsin, M.Si. dan Hayat, S.A.P., M.Si.* 157-169

ANALISIS KOMPONEN INDEKS MODAL SOSIAL MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG

Endry Fatimaningsih

Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung;

Rahayu Sulistiowati

Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

E-mail: endryfatimaningsih@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi modal sosial masyarakat di Provinsi Lampung. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan data skunder dari Statistik Modal Sosial Tahun 2012. Lokasi yang menjadi cakupan kajian ini adalah Provinsi Lampung. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang menjadi sasaran Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 di Provinsi Lampung. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan tabel persentase tunggal.

Hasil penelitian menunjukkan, sebagian besar komponen modal sosial masyarakat Provinsi Lampung dalam kondisi relatif baik, namun terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat pencermatan serius. Komponen modal sosial yang perlu mendapat perhatian serius adalah kepercayaan kepada aparatur, kepercayaan kepada tetangga untuk menitipkan anak, persepsi mendapatkan kemudahan pertolongan dari orang lain, dan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kata kunci: modal sosial, masyarakat, Provinsi Lampung

PENDAHULUAN

Modal sosial sebagai teori dan pendekatan belum banyak diperhatikan, terutama terkait dengan pemanfaatannya untuk pembangunan. Dalam pembangunan, modal yang selalu menjadi bahan pertimbangan untuk formulasi dan implementasi kebijakan adalah modal ekonomi/finansial (*economic capital*) dan modal manusia (*human capital*), sementara modal sosial (*social capital*), hampir tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam menformulasikan berbagai kebijakan dan pendekatan pembangunan. Padahal modal sosial memiliki kelebihan daripada modal ekonomi dan modal manusia. Menurut Coleman (1988,1990), modal sosial adalah produktif dan transformatif, bahkan tersebar lebih luas daripada modal ekonomi dan modal manusia. Karena modal sosial *non-nol* dan *non-komoditas kompetitif*. Modal sosial produktif karena mampu menghasilkan informasi, dukungan, bantuan, dan solidaritas dan membangun sistem kontrol sosial, sistem kepercayaan, dan sistem moral (Esser dalam Castiglione, 2007:25-26). Modal sosial transformatif, karena sifatnya yang memfasilitasi, modal sosial mampu

mengubah modal ekonomi dan modal manusia menjadi lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Konsep modal sosial sesungguhnya bukan konsep yang asing dalam sosiologi. Karena inti yang dikaji oleh modal sosial adalah hubungan antar individu dan antar kelompok, serta manfaatnya bagi individu dan kelompok yang membangun hubungan tersebut. Konsep modal sosial juga bukan konsep/ide yang benar-benar baru, karena tidak terlepas dari teori lama, seperti gagasan pokok Durkheim tentang integrasi, solidaritas, anomie dan sebagainya, dan beberapa konsep terdahulu dari sosiolog lainnya. Modal sosial menjadi konsep yang populer saat ini, karena manfaatnya, dapat menjadi 'sesuatu obat untuk semua penyakit' permasalahan sosial yang terjadi dalam dan luar masyarakat, modal sosial menyediakan solusi non-ekonomi untuk masalah sosial (Portes, 1998).

Coleman(1988: S98) melihat modal sosial sebagai fitur positif berasal dari interaksi antar dan di antara aktor-aktor. Oleh karena itu, bagi Coleman, cara terbaik untuk memahami modal sosial adalah dengan melihat fungsinya, yaitu, sebagai sumber daya yang individu dapat memanfaatkan dalam hubungan mereka dengan lain. Modal sosial, menurut Coleman, mempresentasikan sumber daya karena hal ini melibatkan harapan akan *resiprositas*, dan melampaui individu manapun sehingga melibatkan jaringan yang lebih luas yang hubungan-hubungannya diatur oleh tingginya tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Intinya, bagi Coleman (Field, 2011:35), konsep modal sosial adalah sarana untuk menjelaskan bagaimana orang bekerjasama.

Selanjutnya, menurut Putnam (dalam Field, 2011: 51-52), modal sosial dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: modal sosial yang menjembatani (atau *inklusif*) dan mengikat (atau *eksklusif*). Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas; modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing-masing bentuk tersebut membantu menyatukan kebutuhan yang berbeda. Modal sosial yang mengikat adalah sesuatu yang baik untuk menopang *resiprositas* spesifik dan memobilisasi solidaritas, sambil pada saat yang sama menjadi semacam perekat terkuat dalam memelihara kesetiaan yang kuat dalam kelompok dan memperkuat identitas-identitas spesifik.

Provinsi Lampung sebagai wilayah dengan penduduk terpadat kedua di Pulau Sumatera, tentunya menghadapi beragam permasalahan sosial, dari kemiskinan hingga

konflik sosial. Sebagaimana diketahui, hasil survei BPS tentang modal sosial, indeks modal sosial Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 60,94 pada tahun 2009, menjadi 57,81 pada tahun 2012 (BPS, 2012). Penurunan modal sosial, selayaknya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terutama pelaksana pembangunan. Penurunan modal sosial diidentifikasi sebagai penyebab erosi demokrasi budaya sipil, keterlibatan sipil dan peningkatan sikap apatis sipil (Ostrom dalam D'Agostino, 2010).

Modal sosial yang sering didefinisikan sebagai sumberdaya yang melekat pada hubungan sosial, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Bahkan modal sosial dapat menjadi energi positif yang dahsyat bagi pembangunan (Hasbullah, 2006). Hasil pengukuran indikator modal sosial dapat menjadi data dan informasi yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu input/bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan data skunder dari Statistik Modal Sosial tahun 2012. Statistik Modal Sosial adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dalam Modul Sosial Budaya dan Pendidikan tahun 2012 (Susenas MSBP 2012). Lokasi yang menjadi cakupan kajian ini adalah Provinsi Lampung. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang menjadi sasaran Susenas 2012 di Provinsi Lampung. Responden terkait keterangan modal sosial adalah salah satu anggota rumah tangga yang telah berumur 17 tahun ke atas pada setiap rumah tangga sampel terpilih (BPS, 2012). Sementara itu, teknik analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan tabel persentase tunggal.

Data modal sosial yang disajikan dalam buku Statistik Modal Sosial meliputi dua jenis data, yaitu data dimensi modal sosial dan data indeks modal sosial. Untuk kepentingan analisis, data skunder yang digunakan dalam kajian ini adalah data dari indeks modal sosial. Dengan demikian penyajian data yang dilakukan adalah dengan menyajikan data dari berbagai komponen/faktor pembentuk indeks modal sosial, antara lain:

Tabel 1. Daftar Nama Variabel dan Komponen Indeks Modal Sosial

No	Nama Variabel	Nama Komponen
1.	Sikap percaya kepada aparat desa/kelurahan	Sikap percaya kepada tokoh
2.	Sikap percaya kepada tokoh masyarakat	
3.	Sikap percaya kepada tokoh Agama	
4.	Sikap percaya untuk menitipkan rumah	Sikap percaya kepada tetangga
5.	Sikap percaya untuk menitipkan anak (1-12 tahun)	
6.	Tanggapan terhadap kegiatan suku bangsa lain	Toleransi
7.	Tanggapan terhadap kegiatan agama lain	
8.	Kesiapan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan	<i>Resiprositas</i>
9.	Persepsi kemudahan mendapatkan pertolongan dari tetangga,	
10.	Partisipasi untuk membantu warga terkena musibah	Aksi Bersama
11.	Partisipasi dalam kegiatan kepentingan umum	
12.	Partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan	
13.	Partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berikut komponen indeks modal sosial yang dianalisis berturut-turut, antara lain: (1) Sikap percaya kepada tokoh dan tetangga; (2) Toleransi; (3) *Resiprositas*; (4) Aksi Bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap Percaya Kepada Tokoh dan Tetangga

Sikap percaya dalam modal sosial terkait dengan dimensi *trust* (kepercayaan). *Trust* adalah pengharapan yang muncul dari sebuah komunitas yang berperilaku norma, jujur, kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota lain dari komunitas itu (Fukuyama, 2007: 37). Terkait dengan kepercayaan, Fukuyama (Field, 2011: 102) memberikan pandangan lebih jauh, mendefinisikan kepercayaan itu sendiri sebagai unsur dasar modal sosial. Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan abadi di tengah-tengah masyarakat atau bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Fokus teori Fukuyama adalah menjelaskan mengapa beberapa negara secara ekonomis bisa lebih berhasil daripada negara lain. Atau dapat dipersempit, mengapa suatumasyarakat lebih berhasil dalam menggali dan

mendapatkan nilai-nilai keunggulannya dibanding masyarakat lain dan bagaimana dinamika kerjasama yang ada pada masyarakat.

Sikap percaya mengacu pada kepercayaan pada keandalan seseorang atau sebuah sistem. Hal ini didasarkan pada harapan bahwa orang atau organisasi akan bertindak dengan cara yang diharapkan atau dijanjikan dan akan memperhitungkan kepentingan orang lain. Kepercayaan melibatkan kejujuran, akuntabilitas, perdagangan yang adil dan tingkat kompetensi (*Australian Bureau of Statistics, 2004*). Kepercayaan kepada tokoh adalah salah satu jenis kepercayaan, termasuk dalam jenis kepercayaan kelembagaan sering juga disebut sebagai kepercayaan politik, sedangkan secara sosiologi menjadi bagian dari sistem kepercayaan (*Khodyakov, 2007: 123*).

Pada tabel 2, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap tokoh masih relatif tinggi, persentase di atas 80 persen untuk di daerah perkotaan, dan di atas 90 persen untuk wilayah pedesaan. Dari ketiga jenis tokoh yang disurvei, kepercayaan terbesar diberikan kepada tokoh agama, mencapai 91,45 persen untuk masyarakat di wilayah kota dan 97,14 persen di wilayah pedesaan, serta mencapai 95,78 persen untuk wilayah kota dan desa. Kepercayaan terhadap aparat desa/kelurahan berada pada ranking ketiga, setelah kepercayaan kepada tokoh masyarakat. Namun demikian, besar persentase masih di atas 80 persen, kemudian tokoh masyarakat sebesar 87,82 persen dan kepada aparat desa/kelurahan mencapai 80,64 persen. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan wilayah, maka terlihat bahwa masyarakat pedesaan relatif lebih banyak yang percaya kepada tokoh, dibanding dengan masyarakat di perkotaan.

Tabel 2. Kepercayaan terhadap Aparat Desa/kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, 2012

Jenis Kepercayaan	Kota		Desa		Kota+Desa	
	Tdk Percaya	Percaya	Tdk Percaya	Percaya	Tdk Percaya	Percaya
Aparatur Desa/Kelurahan	19,36	80,64	6,7	93,23	9,81	90,18
Tokoh Masyarakat	12,18	87,82	5,22	94,79	6,89	92,82
Tokoh Agama	8,56	91,45	2,86	97,14	4,23	95,78

Sumber: Lampiran 1-4.2, Statistik Modal Sosial, BPS, 2012

Kepercayaan terhadap tokoh yang relatif masih tinggi, mengindikasikan tingginya kepercayaan politik dalam masyarakat. Kondisi demikian memberikan

peluang bagi tokoh untuk menjalankan roda kepemimpinan dengan ‘sedikit’ masalah, karena kepercayaan tinggi biasanya diiringi oleh kepatuhan. Yang kemudian menjadi persoalan adalah bisakah tokoh-tokoh masih dipercaya bisa bertanggungjawab membawa perubahan masyarakat yang dipimpinnya ke arah lebih baik.

Pada tabel 3 menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap tetangga. Kepercayaan untuk menitipkan rumah kepada tetangga, masih menunjukkan persentase yang relatif tinggi di atas 80 persen untuk masyarakat perkotaan dan di atas 90 persen untuk masyarakat pedesaan. Sedangkan kepercayaan untuk menitipkan anak, cenderung lebih rendah, pada masyarakat pedesaan sekitar 74,06 persen dan 54,13 persen untuk masyarakat perkotaan. Apabila dilihat menurut wilayah, masyarakat pedesaan cenderung lebih percaya kepada tetangga, terbukti dari persentase yang dicapai, persentase untuk menitipkan rumah maupun persentase menitipkan anak, relatif lebih tinggi daripada besar persentase masyarakat perkotaan.

Tabel 3. Kepercayaan terhadap Tetangga, 2012

Jenis Kepercayaan	Kota		Desa		Kota+Desa	
	Tdk Percaya	Percaya	Tdk Percaya	Percaya	Tdk Percaya	Percaya
Menitipkan rumah	18,49	81,51	7,6	92,4	10,21	89,79
Menitipkan anak (1-12 tahun)	45,87	54,13	43,94	74,06	30,72	69,27

Sumber: Lampiran 5-6.2, Statistik Modal Sosial, BPS, 2012

Berdasarkan data pada tabel 2 dan tabel 3 di atas, hal perlu menjadi perhatian lebih lanjut adalah *pertama*, data pada tabel 2 yang menunjukkan hampir mendekati 20 persen ketidakpercayaan terhadap aparat desa/kelurahan di wilayah perkotaan. *Kedua*, ketidakpercayaan terhadap tetangga untuk menitipkan anak baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan berada di atas 40 persen. Tingginya tingkat ketidakpercayaan tersebut kemungkinan terjadi terkait dengan perubahan sistem interaksi yang berkembang dalam masyarakat. Carlo dan Widmer (2009) menulis, aspek kepercayaan tumbuh dari proses interaksi dalam masyarakat (ada praktik, kebiasaan). Orang percaya orang lain, karena adanya interaksi dan perasaan loyalitas positif dan timbal balik yang telah dikembangkan sepanjang hidup mereka. Namun yang perlu menjadi kajian lebih lanjut adalah efek dari ketidakpercayaan adalah sulitnya dibangun sikap kerjasama. Meningkatnya persentase ketidakpercayaan, memberikan indikasi sulitnya terbangun

sistem kontrol yang kuat dan sistem kepercayaan dalam masyarakat. Sulit menjalankan kebijakan/program/kegiatan yang perlu melibatkan seluruh komunitas. Salah satu contohnya, implementasi UU Perlindungan Anak, dimana perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orangtua dan keluarga, namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak berbasis komunitas sangat sulit diwujudkan, apabila tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap tetangga sangat besar.

Toleransi

Toleransi merupakan salah satu perwujudan modal sosial yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di antara anggota masyarakat. Toleransi adalah bagian dari perwujudan sistem moralitas, yang dibentuk dalam jangka waktu yang panjang. Toleransi atau menghargai orang lain merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama orang lain. Sikap ini juga yang pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda, toleransi juga bukan berarti diam tidak berpendapat. Namun toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan bertindak serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak setiap individu untuk bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di komunitas dan hak-hak orang lain. Toleransi dalam kehidupan masyarakat dapat terlihat dari sikap/perilaku terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang berbeda suku bangsa maupun berbeda agama (BPS, 2012).

Tabel 4. Tanggapan Terhadap Kegiatan di Lingkungan Tempat Tinggal, 2012

Jenis Tanggapan	Kota		Desa		Kota+Desa	
	Krg senang	Senang	Krg senang	Senang	Krg senang	Senang
Kegiatan suku bangsa lain	17,53	82,48	10,87	89,12	11,48	87,52
Kegiatan agama lain	16,32	83,68	18,13	81,88	17,69	83,31

Sumber: Lampiran 7-8.2, Statistik Modal Sosial, BPS, 2012

Hasil survei (tabel 4) menunjukkan bahwa sikap toleransi masyarakat Lampung masih relatif tinggi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase tanggapan senang terhadap kegiatan suku bangsa lain dan agama lain masih di atas 80 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut wilayah dan jenis kegiatan, menunjukkan, toleransi terhadap kegiatan suku bangsa lain, persentase tanggapan senang lebih tinggi pada masyarakat pedesaan dibanding masyarakat perkotaan. Sedangkan terkait dengan toleransi terhadap kegiatan agama lain, persentase tanggapan yang senang relatif lebih kecil pada masyarakat pedesaan dibanding dengan masyarakat perkotaan. Kondisi demikian terjadi kemungkinan besar terkait dengan kondisi homogen agama yang dianut dalam masyarakat pedesaan, sehingga tidak terbiasa menghadapi perbedaan kegiatan.

Resiprositas

Konsep hubungan sosial dalam modal sosial diwujudkan dalam keterhubungan, kepercayaan, dan pertukaran (Daly dan Silver, 2008: 543). *Resiprositas* adalah istilah lain dari hubungan pertukaran yang terjalin antar anggota masyarakat. Secara lebih jelas, Jary & Jary (2000) memberikan batasan, *resiprositas* adalah hubungan antara dua pihak atau hal-hal di mana ada tindakan/aksi bersama, memberi dan menerima (Australian Bureau of Statistics, 2004). Setiap pemberian mengandung permintaan untuk mengembalikan apa yang telah diterima, dan karena itu menuntut balasan. Timbal balik dapat didefinisikan dalam arti Maussian (1967) dapat digambarkan sebagai proses sosial yang dinamis, orang memberi, menerima, dan mengembalikan. Ini adalah kekuatan dan manfaat pemberian, setelah diterima dari yang lain menyiratkan komitmen yang ketat untuk memberikan kembali, untuk mengembalikan apa yang telah diterima (Torche, 2011: 183). Dengan demikian dalam *resiprositas*, hubungan pertukaran yang terjadi melampaui pertukaran ekonomi.

Terdapat dua indikator yang digunakan oleh BPS untuk mengukur tingkat resiprositas masyarakat Lampung, yaitu kesiapan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dan persepsi kemudahan mendapatkan pertolongan dari tetangga. Pada tabel 5, menunjukkan, kesiapan masyarakat untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan relatif masih cukup tinggi, persentase di atas 80 persen. Apabila menurut wilayah, masyarakat pedesaan dan perkotaan di Provinsi Lampung memiliki persentase kesiapan yang relatif seimbang. Menariknya, kondisi kesiapan

masyarakat Provinsi Lampung di atas sedikit dari presentase masyarakat Indonesia secara umum.

Tabel 5. Kesiapan Membantu Orang Lain yang Membutuhkan Pertolongan, 2012

Tingkat Kesiapan	Kota		Desa		Kota+Desa	
	Lampung	Indonesia	Lampung	Indonesia	Lampung	Indonesia
Tidak siap	10,46	12,18	10,65	11,98	10,61	12,14
Siap	89,54	87,61	89,31	88,02	89,40	87,86

Sumber: Lampiran 9, 9.1, 9.2, Statistik Modal Sosial, BPS, 2012

Indikator lainnya dari resiprositas, yaitu persepsi kemudahan mendapatkan pertolongan dari orang lain. Secara umum, terdapat 66, 15 persen rumah tangga yang menyatakan mudah untuk mendapatkan pertolongan dari tetangga, dan sisanya, 33,85 persen, memberikan persepsi sulit untuk mendapatkan pertolongan dari tetangga. Apabila dilihat menurut wilayah, masyarakat yang mempersepsi sulit mendapatkan pertolongan dari tetangga, persentase masyarakat perkotaan lebih tinggi dibanding masyarakat pedesaan. Dan sebaliknya, masyarakat pedesaan cenderung mempersepsi mudah mendapatkan pertolongan dari tetangga mencapai 68,33 persen, lebih tinggi dari masyarakat perkotaan. Hal ini terkait dengan pola interaksi yang terjalin dalam masyarakat pedesaan yang masih cenderung melestarikan ciri-ciri masyarakat *gemeinschaft*, tanpa pamrih, *face to face*, dan gotong royong.

Tabel 6. Persepsi Kemudahan Mendapatkan Pertolongan dari Tetangga, 2012

Tingkat Kemudahan	Kota		Desa		Kota+Desa	
	Lampung	Indonesia	Lampung	Indonesia	Lampung	Indonesia
Sulit	40,77	39,55	31,66	34,36	33,85	36,92
Mudah	59,22	60,46	68,33	65,64	66,15	63,07

Sumber: Lampiran 10, 10.1, 10.2, Statistik Modal Sosial, BPS, 2012

Data pada tabel 6, menunjukkan kondisi yang relatif berbeda dengan indikator pertama, kesiapan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kepada orang lain pada tabel 5. Kondisi yang relatif yang berbeda ini yang perlu mendapat perhatian serius. Karena konsep dasar dalam resiprositas adalah hubungan pertukaran. Hubungan pertukaran yang dibangun diharapkan dalam keseimbangan, dapat memberi, dapat menerima, dan dapat mengembalikan. Jika kondisi yang terjadi tidak seimbang, kesiapan membantu tidak dibarengi dengan kemudahan mendapatkan pertolongan, berarti bisa jadi, komitmen *resiprositas* sebenarnya belum muncul. Dinamika Maussian

belum terjadi, orang memberi, menerima kemudian mengembalikan. Padahal *resiprositas* merupakan mekanisme yang luar biasa bila dapat menjadi komitmen/karakter perilaku setiap individu anggota masyarakat. Terdapat kesiapan untuk membantu, berjuang, dan kerjasama, sehingga modal sosial masyarakat semakin kuat. Namun apabila faktanya terjadi ketidakseimbangan pertukaran, maka akibatnya adalah modal sosial masyarakat semakin lemah..

Aksi Bersama

Aksi bersama mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang. Sejauh mana aksi bersama tersebut dapat diukur dan ini merupakan indikator yang mendasari kohesi sosial (BPS, 2012:27). Data aksi bersama menggambarkan kekuatan, kedekatan, dan keluasan hubungan antar anggota masyarakat. Aksi bersama merupakan sumber daya sosial yang dimiliki oleh kelompok/individu yang terlibat dalam rangka mencapai tujuan bersama, karena terkait dengan peran apa yang dapat dimainkan untuk mencapai tujuan bersama. Inti dari aksi bersama adalah adanya sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, sebuah perilaku nyata dan bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan.

Tabel 7. Partisipasi dalam Kegiatan Bersama, 2012

Jenis Partisipasi	Kota		Desa		Kota+Desa	
	Jarang	Sering	Jarang	Sering	Jarang	Sering
Membantu warga terkena musibah	28,37	71,63	23	77	24,28	75,71
Kepentingan umum	52,83	47,05	36,93	83,48	40,77	59,23
Kegiatan sosial keagamaan	39,5	60,5	32,39	67,58	34,12	65,88
Kegiatan sosial kemasyarakatan	63,81	31,11	65,08	34,92	64,77	35,23

Sumber: Lampiran 11-14.2, Statistik Modal Sosial, BPS, 2012

Data pada tabel 7, menunjukkan jenis partisipasi yang memiliki tingkat keseringan tertinggi adalah membantu warga terkena musibah, mencapai 75,71 persen. Berikutnya adalah partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan, sebesar 65,88 persen. Kondisi data apabila diperbandingkan menurut wilayah, memperlihatkan kecenderungan yang relatif variatif. Partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan, dalam kegiatan membantu warga terkena musibah dan kegiatan sosial keagamaan, memberikan jawaban sering di atas 60 persen. Sementara itu, partisipasi pada kegiatan

kepentingan umum dan kegiatan sosial kemasyarakatan, responden yang menyatakan sering, kurang dari 50 persen.

Kondisi di wilayah pedesaan, terdapat tiga kegiatan yang sering diikuti oleh warganya, yaitu: kegiatan membantu warga terkena musibah, kegiatan kepentingan umum, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari tiga kegiatan tersebut, kegiatan yang memiliki partisipasi tertinggi adalah kegiatan kepentingan umum, mencapai 83,48 persen. Kondisi ini merupakan kebalikan dari masyarakat wilayah perkotaan, dimana partisipasi warga dalam kegiatan kepentingan umum, hanya sebesar 47,05 persen.

Mencermati data pada tabel 7, hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak adalah pada rendahnya partisipasi warga baik di wilayah perkotaan dan pedesaan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan manfaat dari kegiatan sosial kemasyarakatan dan tumpang tindih dengan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Disamping itu, dalam kegiatan sosial keagamaan juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komponen modal sosial di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, komponen dari kepercayaan, meliputi kepercayaan terhadap tokoh dan tetangga. Terkait tingkat kepercayaan terhadap tokoh masih relatif tinggi. Kepercayaan tertinggi diberikan kepada tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat dan terakhir terhadap aparat desa/kelurahan. Sementara itu, terkait dengan kepercayaan untuk menitipkan rumah kepada tetangga, masih menunjukkan persentase yang relatif tinggi, sedangkan kepercayaan untuk menitipkan anak, cenderung lebih rendah, terutama untuk masyarakat perkotaan.

Kedua, komponen dari toleransi adalah sikap terhadap kegiatan suku bangsa lain dan kegiatan agama lain. Sikap toleransi masyarakat Lampung terhadap kegiatan suku bangsa lain dan kegiatan agama lain, masih relatif tinggi, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Ketiga, komponen dari *resiprositas*, yaitu kesiapan masyarakat untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dan persepsi kemudahan mendapatkan pertolongan dari orang lain. Kesiapan masyarakat untuk membantu orang lain yang

membutuhkan pertolongan relatif cukup tinggi, sementara persepsi kemudahan mendapatkan pertolongan dari orang lain, menunjukkan persentase yang lebih rendah, bahkan terdapat 33,85 persen, memberikan persepsi sulit untuk mendapatkan pertolongan dari tetangga.

Keempat, komponen dari aksi bersama, digunakan indikator partisipasi dalam berbagai kegiatan bersama, antara lain: kegiatan membantu warga terkena musibah, kegiatan kepentingan umum, kegiatan sosial keagamaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jenis partisipasi yang memiliki tingkat keseringan tertinggi adalah membantu warga terkena musibah, sedang yang terendah adalah pada jenis partisipasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Bureau of Statistics. 2004. *Measuring Social Capital. An Australian Framework and Indicators*. Canberra: Australian Bureau of Statistics.
- Badan Pusat Statistik, 2012. *Statistik Modal Sosial*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Carlo, Ivan De, dan Widmer, Eric.D., 2009. *The Fabric of Trust in Families: Inherited or Achieved?*, University of Geneva
- Coleman, J.S. 1988. "Social Capital in The Creation of Human Capital". *The American Journal of Sociology*. Volume 94, pp. S95-S120
- Coleman, J.S. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Daly, Mary and Silver, Hillary. 2008. Social Exclusion and Social Capital: A Comparison and Critique. *Theor Soc (2008) 37:537–566*. Springer Science+Business Media B.V.
- D'Agostino, Maria J. 2010. Measuring Social Capital as an Outcome of ServiceLearning. *Innov High Educ (2010) 35:313–32*. DOI 10.1007/s10755-010-9149-5. Springer Science+Business Media, LLC.
- Esser, Hartmut. 2007. Two Meaning of Social Capital, dalam Castiglione, Dario; Jan W. Van Deth and Guglielmo Wolleb (Eds.). *The Handbook of Social Capital* (pp. 22–49). New York: Oxford University Press.
- Khodyakov, Dmitry. 2007. Trust as a Process: A Three-Dimensional Approach. *Sociology, BSA Publications Ltd® Volume 41(1): 115–132* SAGE Publications London, Thousand Oaks, New Delhi
- Field, John. 2011. *Kapital Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis. 2007. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (terjemahan), Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press Jakarta
- Portes, Alejandro. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annu. Rev. Sociol. 1998. 24:1-24*. Copyright © 1998 by Annual Reviews.